
**DEMOKRASI DI LINGKUNGAN KAMPUS: ANALISIS AKSI PENYAMPAIAN
ASPIRASI MAHASISWA UNIMED TERKAIT HAK AKADEMIK DALAM
PERSPEKTIF SILA KE-4 PANCASILA**

Nazla Luthfia¹, Rini Pardilla², Naura Ayla³, Putra Hatoguan Simanjourang⁴,
Isa Bella Pasaribu⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Negeri Medan

¹luthfianazla13@gmail.com, ²rinipardilla.ckp@gmail.com,

³nauraayla11@gmail.com, ⁴putrahatoguan52@gmail.com,

⁵isabellapasaribu6@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the dynamics of democratic practice on campus through students' aspiration-voicing actions at Universitas Negeri Medan (Unimed) concerning the Single Tuition Fee (UKT) and the Block 1 Study Plan Card (KRS) issue, viewed from the perspective of the Fourth Principle of Pancasila. The main problem was triggered by the locking of the Block 1 KRS system for students who experienced delays in UKT payment, even though their financial obligations had been fully settled. Using a descriptive qualitative method, data were collected through in-depth interviews with three representative informants: the student action leader, an affected student (victim), and a reporter from the Kreatif Student Press unit. The findings show that the aspiration action functioned as a check-and-balance mechanism triggered by the blockage of formal deliberation channels, which tended to be rigid and to pass student complaints from one unit to another. Viewed from the Fourth Principle of Pancasila, the automated KRS system that nullified students' Block 1 academic rights reflects an erosion of the value of Wise Guidance (Hikmat Kebijaksanaan). Although the mass action succeeded in pressing for the reopening of the UKT and KRS systems, resolution at the operational level remained partial. Meanwhile, the student press played a vital role as an independent pillar of information openness and social control. This study recommends reactivating a periodic deliberative forum (Student Town Hall) and greater flexibility in campus administrative regulations grounded in Pancasila values.

Keywords: *Campus Democracy, Fourth Principle of Pancasila, UKT and Block 1 KRS, Student Aspirations, Student Press, Unimed.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pelaksanaan demokrasi di lingkungan perguruan tinggi melalui aksi penyampaian aspirasi mahasiswa Universitas Negeri Medan (Unimed) terkait isu Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) Blok 1 dalam perspektif Sila Ke-4 Pancasila. Permasalahan utama dipicu oleh penguncian sistem KRS Blok 1 bagi mahasiswa yang mengalami keterlambatan pembayaran UKT, meskipun kewajiban finansial telah dilunasi secara penuh (full). Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam (in-depth interview) dengan tiga narasumber representatif: pimpinan aksi mahasiswa, mahasiswa terdampak (korban), serta reporter UKM Pers Mahasiswa Kreatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksi penyampaian aspirasi merupakan mekanisme penyeimbang (check and

balances) akibat tersumbatnya saluran musyawarah formal yang cenderung kaku dan membola-bola pengaduan mahasiswa. Ditinjau dari Sila Ke-4 Pancasila, penerapan sistem otomatisasi KRS yang menggugurkan hak perkuliahan Blok 1 mencerminkan erosi nilai Hikmat Kebijaksanaan. Meskipun aksi massa berhasil mendesak pembukaan kembali sistem UKT dan KRS, penyelesaian di tingkat operasional masih bersifat parsial. Di sisi lain, Pers Mahasiswa berperan vital sebagai pilar keterbukaan informasi dan pengawasan sosial (social control) yang independen. Penelitian ini merekomendasikan reaktualisasi forum deliberatif berkala (Student Town Hall) dan fleksibilitas regulasi administratif kampus berbasis nilai-nilai Pancasila.

Kata Kunci: Demokrasi Kampus, Sila Ke-4 Pancasila, UKT dan KRS Blok 1, Aspirasi Mahasiswa, Pers Mahasiswa, Unimed.

A. Pendahuluan

Perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pencetak sumber daya manusia berpendidikan, tetapi juga sebagai laboratorium demokrasi dan benteng moral masyarakat (agent of change). Di lingkungan kampus, nilai-nilai demokrasi diuji secara nyata dalam tata kelola hubungan antara birokrasi kampus sebagai pembuat kebijakan dan mahasiswa sebagai pemangku kepentingan (stakeholder) utama.

Dalam beberapa tahun terakhir, salah satu isu krusial yang terus memicu polemik di berbagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) maupun PTN Satker/BLU, termasuk Universitas Negeri Medan (Unimed), adalah masalah Uang Kuliah Tunggal (UKT). Skema UKT yang sejatinya dirancang untuk memberikan keadilan berdasar kemampuan ekonomi orang tua, pada praktiknya sering mengalami misklasifikasi, kenaikan golongan yang memberatkan, serta mekanisme banding yang terkesan rumit dan tertutup.

Kondisi tersebut mendorong timbulnya aksi penyampaian aspirasi oleh gerakan mahasiswa sebagai wujud perlawanan terhadap kebijakan pendidikan yang dianggap komersial. Namun, respons birokrasi kampus kerap kali cenderung represif, instruktif, atau tidak responsif terhadap tuntutan tersebut.

Secara filosofis, berdirinya tata kelola berbangsa dan bernegara di Indonesia dipandu oleh Pancasila. Sila ke-4 Pancasila, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan", memuat landasan fundamental mengenai pentingnya dialog, keterbukaan, kearifan pimpinan, dan penyelesaian masalah secara musyawarah untuk mufakat. Ketika ruang

musyawarah di kampus tersumbat, aksi unjuk rasa atau mimbar bebas menjadi sarana artikulasi politik yang tak terhindarkan.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana fenomena aksi penyampaian aspirasi mahasiswa Unimed terkait isu UKT jika ditinjau dari perspektif Sila Ke-4 Pancasila, serta bagaimana dinamika tersebut dipotret langsung oleh pihak pers mahasiswa dan dialami oleh korban UKT.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami aksi penyampaian aspirasi mahasiswa sebagai bentuk implementasi nilai Sila ke-4 Pancasila di lingkungan Universitas Negeri Medan (Unimed). Penelitian ini berfokus pada pemahaman terhadap pengalaman, pandangan, dan keterlibatan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi kepada pihak kampus. Penelitian ini tidak hanya membahas permasalahan kesulitan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) meskipun mahasiswa telah membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT), tetapi juga mengkaji bagaimana permasalahan tersebut mendorong mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi. Fokus penelitian diarahkan pada proses pengumpulan aspirasi, perumusan tuntutan, pelaksanaan aksi, serta respons pihak kampus yang dianalisis berdasarkan nilai musyawarah, perwakilan, penghargaan terhadap pendapat, dan kepentingan bersama.

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Universitas Negeri Medan (Unimed). Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada adanya permasalahan akademik yang dialami mahasiswa dan munculnya aksi penyampaian aspirasi sebagai bentuk respons terhadap permasalahan tersebut. Waktu penelitian dilaksanakan pada September 2026, yang meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, wawancara informan, dokumentasi, dan analisis data.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan mahasiswa Universitas Negeri Medan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan dan aksi penyampaian aspirasi. Informan penelitian dibagi menjadi dua kelompok, yaitu mahasiswa yang terdampak permasalahan KRS dan mahasiswa yang mengikuti aksi penyampaian aspirasi. Mahasiswa yang terdampak permasalahan KRS menjadi sumber informasi mengenai pengalaman, kendala, dan dampak yang mereka alami, sementara

mahasiswa yang mengikuti aksi menjadi sumber informasi mengenai alasan keterlibatan, proses pengumpulan aspirasi, perumusan tuntutan, pelaksanaan aksi, dan komunikasi dengan pihak kampus. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria dan pengalaman yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan, tetapi tetap memberikan kesempatan kepada informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara lebih luas. Pertanyaan wawancara mencakup latar belakang munculnya aksi, pengalaman mahasiswa dalam menyampaikan keluhan, proses pengumpulan aspirasi, keterlibatan mahasiswa dalam menentukan tuntutan, bentuk penyampaian aspirasi, dan respons pihak kampus.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi, menyederhanakan, dan mengelompokkan informasi ke dalam beberapa tema, seperti latar belakang permasalahan, pengalaman mahasiswa terdampak, proses pengumpulan aspirasi, perumusan tuntutan, pelaksanaan aksi, respons pihak kampus, dan tindak lanjut penyampaian aspirasi. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi dalam bentuk uraian naratif sehingga hubungan antara permasalahan, aksi mahasiswa, dan nilai Sila ke-4 Pancasila dapat dipahami secara sistematis. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis data yang telah diperoleh dari wawancara dan dokumentasi.

Analisis data dalam penelitian ini dikaitkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sila ke-4 Pancasila, yaitu kerakyatan, musyawarah, perwakilan, kebijaksanaan, penghargaan terhadap pendapat, dan kepentingan bersama. Peneliti mengkaji apakah mahasiswa memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, apakah terdapat proses pembahasan atau musyawarah sebelum tuntutan ditentukan, sejauh mana mahasiswa yang mengikuti aksi mewakili mahasiswa terdampak, serta bagaimana dialog dan komunikasi dengan pihak kampus dilakukan. Dengan demikian, aksi mahasiswa tidak hanya dipahami

sebagai bentuk penyampaian tuntutan, tetapi juga sebagai praktik partisipasi demokratis yang dapat dianalisis melalui perspektif Sila ke-4 Pancasila.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Dinamika Pengabaian Hak Akademik dan Kronologi Tersumbatnya Saluran Komunikasi Kampus

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam bersama pihak pimpinan aksi dan mahasiswa terdampak, ditemukan bahwa aksi unjuk rasa penyampaian aspirasi di Universitas Negeri Medan (Unimed) merupakan puncak dari akumulasi kekecewaan atas terbatasnya saluran komunikasi dua arah antara birokrasi kampus dan mahasiswa.

Disparitas Hak dan Kewajiban Akademik (Isu UKT dan Akses KRS Blok1)

Masalah utama bermula dari adanya ketidakseimbangan antara kewajiban finansial yang telah dipenuhi mahasiswa dan hak akademik yang mereka terima. Dalam temuan di lapangan, mahasiswa yang mengalami keterlambatan pembayaran UKT—meskipun pada akhirnya telah melunasi beban biaya pendidikan secara penuh (full)—menghadapi kendala teknis pada penutupan sistem Kartu Rencana Studi (KRS). Hal ini berdampak langsung pada tidak tercatatnya keikutsertaan mahasiswa dalam perkuliahan Blok 1.

Sebagaimana dipaparkan oleh Pimpinan Aksi:

“UKT dibayar secara penuh, namun hak akademik yang diakses mahasiswa tidak proporsional. Sebagai gambaran, dari alokasi 11 mata kuliah dalam satu semester, mahasiswa terdampak hanya dapat mengakses sekitar 5 mata kuliah akibat terkuncinya sistem KRS Blok 1. Fenomena ini tidak hanya menimpa satu atau dua orang, melainkan menjadi kendala kolektif di berbagai fakultas.”

Kondisi ini dikonfirmasi langsung oleh Mahasiswa Terdampak yang merasakan dampak fungsional terhadap alur studinya:

“Saya sudah menyelesaikan kewajiban pembayaran UKT, namun saat hendak melakukan pengisian KRS, akses sistem sudah ditutup. Ketika dikonfirmasi ke unit birokrasi, disampaikan bahwa masa pengisian telah berakhir dan tidak ada skema perpanjangan sistem.”

Prosedur Administrasi Asimetris dan Penyumbatan Saluran Aspirasi

Sebelum keputusan aksi massa diambil, mahasiswa terdampak telah menempuh jalur administrasi formal secara individual maupun perwakilan kelompok. Namun, respons yang diterima cenderung berputar (asimetris) antar-unit pengelola—mulai dari tingkat birokrasi pusat, dekanat, hingga jurusan—tanpa menghasilkan kepastian kebijakan atau diskresi yang solutif.

Selain itu, saluran aspirasi digital seperti kolom komunikasi media sosial resmi kampus juga tidak memberikan umpan balik yang memadai. Kondisi tersumbatnya saluran komunikasi formal ini mendorong mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu untuk melakukan konsolidasi independen berbasis pemetaan data riil (by data) guna menyuarakan aspirasi secara kolektif di tingkat rektorat.

2. Evaluasi Hasil Aksi dan Tindak Lanjut Kebijakan Kampus

Meskipun aksi penyampaian aspirasi berhasil mendorong pihak birokrasi untuk memberikan komitmen pembukaan kembali sistem KRS, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian masalah tersebut masih menghadapi kendala teknis di tingkat operasional.

Efektivitas Pembukaan Sistem Akademik

Pasca-aksi, sistem pengisian KRS kembali dibuka untuk mengakomodasi mahasiswa terdampak. Namun, penyelesaiannya belum berjalan secara menyeluruh (clear). Sebagian mahasiswa di beberapa program studi telah dapat mengakses mata kuliah Blok 1, sementara di unit lain masih terdapat mahasiswa yang tidak sempat menginput data perkuliahan. Bagi mahasiswa yang tidak terakomodasi, solusi yang ditawarkan adalah mengambil ulang mata kuliah tersebut di semester berikutnya, yang berdampak pada efisiensi waktu studi dan potensi beban finansial susulan.

Tantangan Partisipasi Aktif Mahasiswa

Dinamika pasca-aksi juga menunjukkan adanya tantangan bagi mahasiswa yang vokal dalam mengawal isu publik kampus. Terdapat kekhawatiran dari pihak pengelola institusi mengenai potensi dampak penyampaian aspirasi terhadap citra lembaga. Hal ini menegaskan pentingnya membangun pemahaman bersama bahwa partisipasi kritis mahasiswa merupakan bagian utuh dari kebebasan akademik dan dinamika keorganisasian yang sehat.

3. Peliputan dan Dokumentasi Aksi: Perspektif Pers Mahasiswa Kreatif

Guna memperoleh gambaran komprehensif dan objektif mengenai realita penyampaian aspirasi di lapangan, penelitian ini dilengkapi dengan perspektif independen dari UKM Pers Mahasiswa Kreatif Unimed melalui wawancara bersama Safwan Fitra Gari (Reporter Persma Kreatif dan mahasiswa Program Studi Bisnis Digital, FE Unimed). Keterangan dari pihak persma berfungsi sebagai instrumen pengamatan (observational baseline) yang memotret jalannya aksi, kehadiran birokrasi, verifikasi informasi, serta tindak lanjut pasca-peliputan.

Observasi Lapangan dan Kehadiran Pihak Birokrasi

Berdasarkan hasil pengamatan reporter di lokasi kejadian, aksi penyampaian aspirasi berlangsung dengan keterlibatan massa mahasiswa yang signifikan, diiringi orasi, penggunaan alat pengeras suara, serta pembentangan spanduk tuntutan. Meskipun situasi riuh dan dipenuhi antusiasme massa, reporter mengonfirmasi bahwa kondisi aksi tetap terkendali dan tidak mengarah pada tindakan anarkis atau merusak fasilitas umum.

Dalam aspek dialog publik, persma mencatat adanya ketimpangan keterwakilan dari pihak birokrasi kampus. Mahasiswa secara konsisten menghendaki kehadiran Rektor Unimed secara langsung untuk mengambil keputusan strategis. Namun, dalam dinamika di lapangan, Rektor tidak hadir dalam ruang dialog tersebut. Unsur birokrasi yang hadir menemui massa aksi diwakili oleh jajaran dekanat fakultas serta pihak pimpinan di bawah koordinasi Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan). Kehadiran perwakilan tersebut memang membuka ruang komunikasi awal, namun belum sepenuhnya memuaskan ekspektasi massa aksi yang membutuhkan kepastian diskresi dari pengambil kebijakan tertinggi.

Proses Kerja Jurnalistik dan Verifikasi Data Liputan

Sebagai lembaga pers kampus, Persma Kreatif menjalankan fungsi cross-checking dan tanggung jawab etik pemberitaan. Reporter menghadapi kendala teknis di lapangan, seperti bisingnya situasi dan kesulitan mendeteksi Koordinator Lapangan (Korlap) aksi. Namun, melalui pendekatan komunikatif, wawancara mendalam bersama pimpinan aksi berhasil dilakukan guna memastikan substansi tuntutan—seperti perpanjangan sistem UKT, perbaikan mekanisme KRS/sistem blok, serta evaluasi kelembagaan—tercatat secara akurat.

Selain itu, mengenai independensi dan kebebasan pers, reporter mengonfirmasi bahwa produk jurnalistik berupa video live report yang diunggah tidak mengalami intervensi atau penghapusan (takedown) oleh pihak mana pun. Persma menerapkan prinsip verifikasi berulang terhadap isu-isu sensitif internal kampus sebelum dipublikasikan. Mekanisme pengujian informasi ini penting agar berita yang disebarluaskan berlandaskan fakta yang tervalidasi dan tidak menimbulkan disinformasi publik.

Pemantauan Tindak Lanjut Pasca-Aksi

Perspektif Pers Mahasiswa mengonfirmasi adanya dampak langsung dari aksi penyampaian aspirasi. Pasca-aksi berlangsung, sistem pembayaran UKT dibuka kembali oleh pihak birokrasi setelah dilakukan proses pendataan mahasiswa terdampak yang dihimpun melalui skema koordinasi kelembagaan kemahasiswaan dan ditindaklanjuti bersama Wakil Rektor. Kendati demikian, persma mencatat bahwa efektivitas tindak lanjut tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan seluruh tuntutan secara serentak, sehingga peran pengawasan (monitoring) berkelanjutan tetap diperlukan.

4. Analisis Aksi Penyampaian Aspirasi dalam Perspektif Sila Ke-4 Pancasila

Sila ke-4 Pancasila memuat prinsip dasar: “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Prinsip ini menuntut agar tata kelola tata pamong perguruan tinggi dijalankan atas dasar musyawarah yang inklusif, rasionalitas kebijakan, transparansi informasi, serta empati terhadap warga akademik.

Tabel 1 Analisis Indikator Sila Ke-4 Pancasila dalam Tata Kelola Kampus

Indikator Sila Ke-4 Pancasila	Praktik Ideal dalam Tata Kelola Kampus	Realita Lapangan Berdasarkan Temuan Studi	Evaluasi Kritis Akademik
Musyawarah untuk Mufakat	Membuka ruang dialog dua arah (Student Town Hall) yang inklusif untuk menyerap kendala administratif mahasiswa.	Proses koordinasi bertahap dari tingkat jurusan hingga birokrasi belum menghasilkan solusi yang responsif.	Tersumbat. Jalur musyawarah formal belum optimal sehingga mendorong penggunaan instrumen aksi massa.
Hikmat Kebijaksanaan	Kebijakan administratif bersifat adaptif dan mempertimbangkan rasionalitas kondisi mahasiswa.	Penerapan aturan batas waktu sistem dilakukan secara kaku tanpa mempertimbangkan pelunasan UKT yang sudah terjadi.	Kekakuan Sistemik. Regulasi teknis mengabaikan prinsip fleksibilitas demi perlindungan hak akademik.

Keterbukaan & Akuntabilitas Publik	Pimpinan institusi hadir membuka dialog secara transparan dan dipublikasikan secara terbuka.	Rektor tidak hadir langsung; dialog diwakili WR III dan Dekanat. Persma hadir mendokumentasikan fakta secara objektif.	Akuntabilitas Parsial. Kehadiran perwakilan birokrasi perlu diimbangi keterbukaan informasi yang dapat diakses publik.
Partisipasi dan Pengawasan Sosial	Kebebasan pers dan partisipasi kritis mahasiswa dijamin sebagai sarana check and balances.	Mahasiswa menyampaikan aspirasi secara kolektif; Persma menjalankan fungsi peliputan dan verifikasi tanpa intervensi.	Demokrasi Aktif. Keberadaan persma memperkuat transparansi dan mengawal jalannya prinsip-prinsip demokratis.

1. Reaktualisasi “Hikmat Kebijakan” dalam Tata Kelola Administrasi

Prinsip hikmat kebijakan mengamanatkan bahwa setiap regulasi dan sistem tata kelola di perguruan tinggi harus berorientasi pada kemaslahatan warga akademik. Penutupan akses KRS secara otomatis oleh sistem komputer—ketika mahasiswa telah melunasi UKT—menunjukkan dominasi pendekatan teknokratis yang kaku. Dalam perspektif Pancasila, sistem administratif seharusnya berfungsi sebagai alat penunjang pendidikan, bukan hambatan yang menggugurkan hak belajar mahasiswa.

2. Penguatan Forum Musyawarah yang Inklusif dan Egaliter

Nilai musyawarah mufakat menolak pendekatan satu arah (top-down) dalam penyelesaian sengketa akademik. Kebuntuan dialog yang dialami mahasiswa sebelum aksi menandakan belum optimalnya wadah musyawarah resmi di lingkungan kampus. Sebagaimana diamati oleh Pers Mahasiswa, format audiensi yang ideal membutuhkan kehadiran langsung pimpinan tertinggi institusi (Rektor) agar keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat, holistik, dan tidak menimbulkan penundaan penyelesaian masalah.

3. Legitimasi Aksi Massa dan Peran Pers Mahasiswa sebagai Pilar Transparansi

Dalam konteks Sila Ke-4 Pancasila, penyampaian aspirasi melalui aksi unjuk rasa yang tertib dan berbasis data riil (by data) merupakan manifestasi dari kedaulatan mahasiswa sebagai pemangku kepentingan utama (main stakeholder). Kehadiran UKM Pers Mahasiswa Kreatif sebagai pihak netral yang memotret, memverifikasi, dan memublikasikan dinamika aksi memperkuat iklim demokrasi kampus. Keterbukaan informasi yang disajikan persma memastikan bahwa penyampaian pendapat tidak berhenti di lokasi aksi, melainkan menjadi rekaman

publik yang mendorong akuntabilitas birokrasi. Dengan demikian, pers mahasiswa berperan penting dalam menjaga pengawasan sosial (social control) demi terwujudnya tata kelola kampus yang berkeadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

D. Kesimpulan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kualitatif deskriptif mengenai fenomena aksi penyampaian aspirasi mahasiswa Universitas Negeri Medan (Unimed) terkait permasalahan UKT dan KRS Blok 1 dari perspektif Sila Ke-4 Pancasila, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Buntunya Saluran Musyawarah Formal:** Aksi penyampaian aspirasi oleh mahasiswa Unimed dipicu oleh tersumbatnya saluran komunikasi dan musyawarah formal di lingkungan kampus. Prosedur penanganan pengaduan mahasiswa terkait kendala pengisian KRS pasca-pelunasan UKT cenderung berjalan asimetris (dibola-bola) dan kaku, sehingga mendorong mahasiswa menggunakan instrumen aksi massa sebagai media artikulasi politik dan penyeimbang (check and balances).
- 2. Erosi Nilai Hikmat Kebijaksanaan dalam Regulasi Teknis:** Penutupan akses KRS secara otomatis oleh sistem ketika mahasiswa telah melunasi UKT—yang berakibat pada tidak terhitungnya keikutsertaan mahasiswa dalam perkuliahan Blok 1—mencerminkan minimnya implementasi prinsip Hikmat Kebijaksanaan. Kebijakan administratif bersifat teknokratis kaku ini belum memprioritaskan pemenuhan hak mendasar akademik mahasiswa.
- 3. Penyelesaian Masalah yang Bersifat Parsial:** Meskipun aksi massa berhasil mendesak birokrasi kampus untuk membuka kembali sistem pembayaran UKT dan pengisian KRS, realisasi kebijakan di tingkat operasional belum sepenuhnya tuntas secara serentak di seluruh fakultas/program studi. Sebagian mahasiswa masih harus menanggung beban tambahan dengan mengulang mata kuliah di semester berikutnya.
- 4. Peran Vital Pers Mahasiswa dalam Transparansi Demokrasi:** Kehadiran Pers Mahasiswa Kreatif sebagai pihak independen terbukti memperkuat iklim demokrasi kampus. Peliputan dan verifikasi berita yang objektif berfungsi menjaga keterbukaan informasi publik, mengawal akuntabilitas janji birokrasi,

serta memastikan proses penyampaian pendapat berjalan dalam koridor yang konstruktif dan bertanggung jawab.

Saran

Sejalan dengan temuan penelitian ini, peneliti merumuskan beberapa saran akademis dan praktis guna mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang bernafaskan nilai-nilai Pancasila:

1. Bagi Birokrasi Kampus (Pimpinan Unimed):

- a. **Reaktualisasi Forum Deliberatif:** Perlu dibentuk wadah musyawarah berkala yang inklusif dan terstruktur (Student Town Hall) antara pimpinan tertinggi institusi (Rektorat), Dekanat, dan perwakilan mahasiswa guna menyerap aspirasi dan kendala administratif secara langsung.
- b. **Fleksibilitas Kebijakan Akademik:** Meninjau kembali regulasi sistem otomatisasi KRS agar memiliki ruang diskresi kemanusiaan (policy override) bagi mahasiswa yang telah melunasi kewajiban UKT, sehingga hak studi perkuliahan Blok 1 tidak digugurkan secara sepihak.

2. Bagi Gerakan Mahasiswa:

- a. **Penguatan Gerakan Berbasis Data (Data-Driven Advocacy):** Konsolidasi gerakan hendaknya terus mengedepankan inventarisasi data riil (by data) yang valid dan komprehensif, serta menjaga kesantunan berdemokrasi Pancasila agar tuntutan yang disampaikan memiliki dasar legitimasi yang kuat dan rasional.

3. Bagi Pers Mahasiswa:

- a. **Konsistensi Pengawasan Sosial (Social Control):** Diharapkan tetap mempertahankan independensi, etika jurnalistik melalui verifikasi berulang, serta secara konsisten melakukan pemantauan (monitoring) pasca-aksi terhadap realisasi janji kebijakan yang dikeluarkan oleh birokrasi kampus.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainii, I. A. Q., Fivcel, N. S., Heryati, S., Sudrajat, N. A., & Supriyono, S. (2025). Implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(3), 36542–36544.
- Astuti, L. (2018). Pemanfaatan media sosial dalam penyampaian aspirasi mahasiswa. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 5(2), 1–5.
- Budiardjo, M. (2015). *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi Revisi). Gramedia Pustaka Utama.

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Kaelan. (2013). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma.
- Latif, Y. (2011). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Notonagoro. (1980). *Pancasila secara ilmiah populer*. Pantjuran Tuju.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Putri, A. M., Sari, D. P., Putri, H. N. S., Nurazizah, S. B., & Supriyono, S. (2025). Peran Gen Z dalam mengimplementasikan Sila ke-4 Pancasila di era digital. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(3), 39607–39616.
- Sudiyono, A. (2019). Kebebasan akademik dan artikulasi gerakan mahasiswa dalam tata kelola perguruan tinggi. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(2), 112–128.
- Turnip, G. S., Damanik, W. R., Lingga, Y. K., Ramadhani, S., Samosir, F. P. J., & Ivanna, J. (2025). Peran mahasiswa melalui Senat Mahasiswa Universitas Negeri Medan dalam memperjuangkan aspirasi berdasarkan konstitusi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(3), 31969–31973.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166.